

**PENDIDIKAN DAN ARSITEKTUR BERBASIS
KOMUNITAS: SEBUAH UPAYA DEMOKRATISASI
RUANG PUBLIK KOTA**

*(LIFE LONG EDUCATION IN COMMUNITY ARCHITECTURE: A PROSPECT
FOR PUBLIC SPACE DEMOCRATIZATION IN URBAN)*

M. Syaom Barliana

Makalah pernahdisampaikan dalam “International Seminar Long Life
Education for Prosperity and Democatization”, Agustus 2008,
Universitas Pendidikan Indonesia

Bandung, 2008

PENDIDIKAN DAN ARSITEKTUR BERBASIS KOMUNITAS: SEBUAH UPAYA DEMOKRATISASI RUANG PUBLIK KOTA

*(LIFE LONG EDUCATION IN COMMUNITY ARCHITECTURE: A PROSPECT
FOR PUBLIC SPACE DEMOCRATIZATION IN URBAN)*

M. Syaom Barliana

What is a city but its citizens (William Shakespeare).

ABSTRAK

Derajat agresifitas anak-anak muda di perkotaan, yang berujung kepada bentuk-bentuk kekerasan dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tindakan kekerasan yang kembali marak itu, sesungguhnya merupakan bagian dari ragam penyimpangan perilaku yang khas urban, dan merupakan suatu patologi sosial. Dalam konteks perancangan dan penataan kota, paling tidak ada dua sebab yang dapat ditunjuk atas fenomena itu. Pertama, perancangan kota yang dilakukan oleh para penguasa, perencana kota, dan arsitek, dengan perspektif politik dan ekonomi, cenderung melihat kota sebagai sebuah estetika fisik belaka. Kedua, masyarakat, seringkali ditempatkan sebagai penonton dalam penataan kota. Kalaupun ada kegiatan “dengar pendapat” atau “uji publik”, seringkali bersifat formalitas belaka. Kebutuhan masyarakat lebih sering didefinisikan oleh kaum birokrat, yang justru tidak memahami aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Telaah ini, adalah mengenai hal terakhir itu, yaitu mengkaji pengaruh fisik tata ruang kota, terhadap tumbuhnya perilaku kekerasan, vandalisme, alienasi, anomie, dan ragam perilaku menyimpang lainnya, serta bagaimana peran pendidikan dan arsitektur mereduksi gejala negatif tersebut.

CATATAN AWAL: Suatu Patologi yang Khas Urban

Derajat agresifitas anak-anak muda di perkotaan, yang berujung kepada bentuk-bentuk kekerasan dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Aksi kekerasan anak muda perkotaan ini, bukan saja merupakan cerminan dari perilaku kenakalan, tetapi bahkan sudah mengarah ke tindak kriminal yang sampai merenggut sejumlah korban jiwa. Perkelahian antar pelajar, aksi geng motor yang tanpa sebab melakukan kekerasan terhadap anggota masyarakat umum, tindakan kekerasan dalam inisiasi anggota geng motor, bahkan geng anak-anak perempuan, adalah beberapa contoh yang mencuat.

Tindakan kekerasan yang kembali marak itu, sesungguhnya merupakan bagian dari ragam penyimpangan perilaku yang khas urban, dan merupakan suatu patologi sosial. Sebagai suatu penyakit sosial, maka akar dan solusi permasalahannya selayaknya tidak dicari hanya pada tindakan kekerasan itu sendiri. Pendekatan keamanan baik berupa tindakan preventif dengan cara pemeriksaan terhadap pelajar maupun tindakan kuratif dengan cara menangkap, menahan, dan memberi sanksi hukum, sesungguhnya hanyalah upaya yang bersifat sementara. Upaya yang lebih jauh perlu dilakukan, dengan cara pandang lebih luas, yang dimulai dengan cara menempatkan tindakan kekerasan anak muda itu sebagai respon dari kondisi lingkungan sosial-budaya, sosial-ekonomi, psikologis, politik, dan bahkan terutama kondisi tata ruang kota yang melingkupinya.

Soalnya jelas, bahwa perilaku kekerasan yang diungkapkan oleh para anak-anak muda, sesungguhnya merupakan bagian yang inheren dari perilaku umum masyarakat kota yang menderita apa yang disebut *sizofrenia kultural*, yaitu masyarakat manusia "sakit" yang berwajah garang, berwatak keras, dan berperilaku liar serta brutal. Masyarakat, yang satu sama lain saling bermusuhan dan agresif, dalam suatu kebudayaan kota yang mengalami dehumanisasi. Akibatnya, konflik sosial, kekerasan, kerusuhan sosial, vandalisme, alienasi, anomie, apatisme (ketidakpedulian) sosial, dan kriminalitas, merupakan realitas yang semakin tampak sebagai suatu kecenderungan dan menjadi perilaku keseharian masyarakat kota di Indonesia.

Banyak sebab yang dapat ditunjuk sebagai pemicu terjadinya fenomena itu, misalnya faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Relevan dengan itu, Hassner (2003 : 87) menyatakan, bahwa "berbagai konflik umumnya berkaitan dengan tekanan-tekanan internal: di tingkat ekonomi terjadi pada masa krisis; di tingkat politik terjadi jika kelebihan dan persaingan mencari ruang hidup memungkinkan timbulnya sistem negara yang kuat dengan kekuasaan otoriter; di dalam jiwa masing-masing individu dimana keinginan pada hal-hal yang absolut, pada identitas komunal, pada kekerasan, dan hirarki mungkin akan senantiasa muncul".

Di luar persoalan tersebut, dalam konteks perancangan dan penataan kota, paling tidak ada dua sebab yang dapat ditunjuk. Pertama, perancangan kota yang dilakukan oleh para penguasa, perencana kota, dan arsitek, dengan perspektif politik dan ekonomi, cenderung melihat kota sebagai sebuah

estetika fisik belaka. “Ketertiban” dan “keteraturan” menjadi mantra magis yang menjadi kuasa estetik. Padahal, menurut Achmadi (2002), bahasa “ketidakteraturan” tidak selamanya negatif, melainkan merupakan interpretasi kemajemukan publik. Sebaliknya, “keteraturan” seringkali mengemas misi kekuasaan opresif yang melecehkan publik berikut karakter sosial di dalamnya. Yang tercipta adalah simbol kekuasaan yang mengasingkan publik. Keteraturan menjadi pembenaran akan “penggusuran” di mana kota menyerang publiknya sendiri. Bukannya memberdayakan, ia malah meniadakan. Kedua, masyarakat, seringkali ditempatkan sebagai penonton dalam penataan kota. Kalaupun ada kegiatan “dengar pendapat” atau “uji publik”, seringkali bersifat formalitas belaka. Kebutuhan masyarakat lebih sering didefinisikan oleh kaum birokrat, yang justru tidak memahami aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat.

Telaah ini, adalah mengenai hal terakhir itu, yaitu mengkaji pengaruh fisik tata ruang kota, terhadap tumbuhnya perilaku kekerasan, vandalisme, alienasi, anomie, dan ragam perilaku menyimpang lainnya, serta bagaimana peran pendidikan dan arsitektur mereduksi gejala negatif tersebut. Analisis diletakkan dalam konteks arsitektur berbasis komunitas, yang berarti partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pendidikan sepanjang hayat (*life long education*). Tulisan ini disusun dalam tiga bagian. Bagian pertama, mengkaji kasus kecenderungan pembangunan kota serta problem-problem yang ditimbulkannya terhadap kemanusiaan. Bagian kedua, memaparkan beberapa pemikiran teoritis mengenai pembangunan kota yang lebih manusiawi dan berkelanjutan (*sustainable*). Bagian ketiga, menguraikan analisis teoritik dan empirik mengenai pendidikan dan arsitektur berbasis komunitas, yang didalamnya terkait partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan khususnya penataan kota.

PEMBANGUNAN KOTA: Problem-problem bagi Kemanusiaan

Kesemrawutan beberapa kota besar di banyak negara, saat ini mencapai kondisi yang akut. Kota-kota besar di Jepang, Amerika dan Eropa, misalnya, terpasung dalam situasi “menyesakkan”, seperti ketidakjelasan (*confused*), tanpa dasar (*groundless*), serta mengawang-awang (*unreal*). Sementara,

masyarakat kelas bawah sudah tidak dihargai lagi oleh rancangan fisik kota yang elitis, kaku, serta gigantis.

Demikian pula pengembangan kota-kota besar di Indonesia, yang justru berlomba melakukan imitasi pada wajah-wajah kota di negara maju, seolah-olah guna mengulangi kesalahan yang sama. Jakarta misalnya, kini tumbuh menjadi sebuah megapolitan yang berkembang pesat, yang masuk dalam jaringan kota-kota besar dunia. Keinginan Jakarta menjadi *service city*, dan kota yang menarik investasi asing ke Indonesia, membuat wajah kota betapapun harus berubah, agar mampu melakukan inovasi dalam kondisi macam apapun.

Pembangunan terus dipacu dan merebakkan gedung-gedung jangkung: hotel, perkantoran, pertokoan, mal, apartemen mewah, superblok, dan sebagainya. Aneka ragam jalan layang, jalan tol, *by pass*, dan lain-lain juga saling menjalin. Perkembangan kota Jakarta yang pesat, berlangsung gegap gempita menyiratkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meskipun kemudian terpuruk akibat krisis ekonomi dan kebijakan pembangunan yang keliru. Disisi lain, gelombang globalisasi membuat wajah kota besar itu, nyaris menjadi seragam, dan merupakan imitasi dari kota-kota besar dunia.

Perkembangan kota yang begitu cepat, memang menjanjikan terealisasinya mimpi indah bagi sekelompok orang yang memiliki kemampuan, kemauan, dan kesempatan. Akan tetapi, bagi sebagian warga yang tidak memiliki akses dan peluang, kehidupan yang keras di Jakarta bisa merupakan mimpi buruk. Akibatnya, terjadi ketimpangan atau *inequalities* antar kelompok masyarakat perkotaan, dalam memperoleh lahan dan akses untuk menikmati segenap fasilitas sosial dan infra struktur kota yang tersedia.

Ini terjadi, karena kebijakan pembangunan yang berorientasi pada “proyek”, menggunakan pendekatan *supply*. Akibatnya, kebutuhan riil dari masyarakat bawah tidak dilayani, karena keberadaan lingkungan hunian di area *slum* dan *squatter* sendiri tidak diakui sebagai suatu realitas di perkotaan. Padahal, kondisi semacam itu merupakan implikasi yang logis dari strategi pembangunan perkotaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap aspek lingkungan dan kependudukan. Pembangunan kota mengubah banyak dimensi fisik lingkungan alam menjadi lingkungan manusia (*built environment*). Perubahan yang terjadi, juga bersinggungan dengan lingkungan sosial masyarakat kota. Apabila perubahan yang terjadi, tidak berada pada

keseimbangan, maka akan menimbulkan implikasi sosial yang dahsyat. Terjadinya pemukiman kumuh, persaingan yang keras, keterasingan manusia dengan lingkungannya, merupakan eksese serta indikator perubahan-perubahan yang tidak seimbang antara pembangunan fisik sosial dalam pengelolaan kota.

Bangunan hunian tinggi (*high rise buildings*) yang bertumpuk-tumpuk dikota-kota besar adalah contoh dari pembangunan kota yang membuat penghuninya menjadi asing dan terlempar dari lingkungan sosialnya, terkurung dalam belukar beton yang menyesakkan. Menara-menara yang menjulang tinggi itu ternyata menimbulkan bencana dalam kehidupan kota dan mengundang implikasi sosial, dengan memicu hubungan antar manusia yang terdegradasi situasi. Selanjutnya kondisi itu, memberi tekanan psikologis yang bisa melakukan orang berperilaku negatif, seperti bunuh diri, tindakan agresifitas, dan sebagainya. Biaya sosial (*social cost*) semacam itu memang harus dibayar warganya, dan sama sekali tidak bisa dibayar dengan uang.

Perlu disadari bahwa kota secara morfologis, bukan sekadar kenyataan fisik. Di sana terdapat kontinuitas interaksi antara lingkungan terbangun (*built enviroment*) dengan manusia dalam konteks sosial, budaya, dan psikologis. Dalam perancangan tata ruang kota, manusia beserta atribut yang disandangnya, merupakan obyek sentral sekaligus subyek yang harus ditingkatkan kualitasnya, yang harus diperhatikan eksistensinya. Ruang kota harus mampu melayani keberagaman (*pluralitas*) setiap lapisan warga kota secara proporsional. Penerapan konsep *enviromental-man* dalam perencanaan tata ruang kota, yang mencari hubungan kesenyawaan antara manusia dan lingkungan yang bersifat lebih holistik, tampaknya lebih relevan dalam mengimbangi perusakan fisik dan jiwa kota.

Pembangunan perkotaan di Indonesia seringkali lepas dari fenomena sosial dan budaya yang tumbuh, sehingga lepas kepedulian terhadap masyarakat. Hal ini terjadi, karena perencanaan kota terlalu menekankan pada aspek planologis, terutama estetikanya, sehingga menimbulkan konflik karena tidak mengakomodasikan ruang-ruang untuk saling berinteraksi dalam tataran sosiologis. Pola-pola *top down* yang diterapkan selama ini telah menunjukkan bahwa perencana kota, penentu kebijakan memperlakukan lingkungan kota hanya sebatas “fenomena fisik” ketimbang “fenomena budaya” (Danisworo, 2007). Masyarakat sebagai pengguna, pelaku dalam sebuah *place*

yang merupakan dimensi yang paling penting dalam proses perancangan, belum secara optimal dilibatkan.

Dalam semangat yang sama Trancik (1986) menuding, bahwa kota-kota modern menyiratkan kecenderungan *antispace* atau menciptakan *lost space*. Perubahan konteks kota yang begitu cepat telah menghadirkan deteritorialisasi, dimana secara terus menerus setiap orang dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan organisasi tata ruang kota yang baru yang terus berubah. Gedung-gedung yang terus dibangun, jalan-jalan yang dibangun untuk mengatasi kemacetan (orang naik mobil untuk membuat jarak bukan untuk menempuh jarak), dan ruang-ruang komunal (*public space*) sebagai tempat bersosialisasi yang nyaris hilang ditelan masa bangunan akibat harga tanah yang semakin tinggi, adalah beberapa contoh yang terjadi. Akibatnya, warga kota seolah-olah tidak mempunyai hak untuk mendefinisikan ruang hidupnya sendiri, tidak memiliki kesempatan untuk berdialog dengan lingkungan binaan yang baru, kecuali harus menyesuaikan diri

Selanjutnya, deteritorialisasi menyebabkan stabilitas sosial dan keseimbangan psikologis terganggu, sehingga untuk sebagian lahir fenomena reproduksi kebudayaan asal atau pemunculan simbol dan atribut kelompok, sebagai reaksi terhadap perubahan tata kehidupan kota. Setiap orang bukannya berbaur dan menyosialisasikan diri, melainkan kembali mengidentifikasikan dirinya ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan identitas dan orientasi nilai yang sama.

Dengan begitu setiap orang mengikuti logikanya sendiri-sendiri dalam membangun perbedaan-perbedaan, sehingga melihat sesama (sejawat) sebagai “orang asing” karena definisi diri, orang lain, cinta dan kasih sayang telah menjadi kegiatan pasar. Tanpa tumbuhnya rasa bertetangga, bersejawat dan kohesi sosial akibat penataan ruang perkotaan yang cenderung individualistik dan elitis, tak pelak lagi berkembanglah suasana keterasingan (alienasi) dan kehidupan sosial yang lepas dari nilai-nilai (anomi). Alienasi dan anomie tersebut merupakan dua faktor kuat pemicu kekerasan, antara lain kekerasan yang dilakukan anak muda dan pelajar karena mereka tidak lagi merasa saling terikat dalam suatu tingkat kekerabatan, paguyuban, serta bentuk *neighbourly link* dan *peer group* yang kohesif.

Agresifitas remaja terjadi antara lain dipicu oleh tidak tersalurkannya berbagai kebutuhan fisik dan psikologis (mental, emosional, dan intelektual)

remaja sesuai dengan tingkat perkembangan kepribadiannya. Ini akan mempengaruhi disorientasi mental secara individual dan disharmoni sosial secara kolektif. Kebutuhan-kebutuhan tersebut, antara lain adalah kebutuhan untuk bermain, bersosialisasi, *self actualization needs*, *self esteem needs*, *love needs*, *safety needs*, dan *sebagainya*. Sebagian kebutuhan-kebutuhan tersebut seyogyanya dapat dipenuhi oleh rancangan fasilitas fisik perkotaan yang baik, misalnya tersedianya ruang-ruang bermain, ruang-ruang bersama/komunal, *public and open space*, *amenity space*, maupun corak-corak desain tertentu yang memiliki muatan estetika dan sekaligus memberi kepuasan psikologis.

Fenomena patologi sosial yang mewarnai kehidupan remaja perkotaan yang mendorong lahirnya tindak kekerasan (anarkisme), bermula dari ketidakmampuan lingkungan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan fisik-fatologis remaja, sesuai dengan usia perkembangannya. Remaja menjadi terasing, teralienasi, merasa kesepian dalam gemuruhnya kesibukan kota, akibat minimalnya fasilitas lingkungan seperti wadah bermain dan bersosialisasi yang bisa menerima mereka. Semakin miskinnya ruang publik di perkotaan akibat tekanan ekonomi, tekanan penduduk, proses kapitalisasi, dan proses materialisasi kota yang berlebihan, menyebabkan masyarakat kehilangan wadah aktivitas bersama dan interaksi yang bermakna sosial kultural untuk memupuk modal sosial (*social capital*).

Kalau sekarang anak-anak dan remaja sudah merasa tidak memiliki lingkungan kotanya, maka banyak hal yang mungkin terjadi. Corat-corek pada dinding tembok rumah dan tempat-tempat umum, bisa jadi merupakan contoh sederhana dari kehendak membuat grafiti pada dinding beton polos dan dingin. Ini kemudian seolah menjadi saksi makna keberadaannya di tengah lingkungan kota. Hal lain yang mungkin terjadi, misalnya karena karena tidak terdapat area bermain yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak, mereka akan lari ke jalan-jalan, ke ruang terbuka sekitar stasiun kereta api, halaman pasar, atau ke plaza pertokoan di mana saja.

Meskipun demikian, menurut amatan Senjaya (2003), di Bandung, “ada gerakan-gerakan anak muda dari subkultur yang cukup inspiratif. Juga terdapat advokasi kebudayaan yang dilakukan oleh komunitas-komunitas kecil, yang menyelenggarakan acara-acara kegiatan langsung di ruang publik berupa *performance art* di gang yang sempit, di kebun rumah, di kandang kambing, di belakang terminal, di ruang-ruang bekas pabrik, di Sungai

Cikapundung, di kendaraan angkot (angkutan kota), di halaman masjid, gereja, di tempat prostitusi, di ruang-ruang publik yang sebetulnya berada dalam tubuh kita sendiri, yang telah diisi oleh berbagai paradoks.” Ini adalah potensi partisipasi masyarakat yang harus terus dikembangkan, di tengah berbagai paradoks kota.

REORIENTASI PEMBANGUNAN KOTA: Pendekatan Psiko-Spasial

Perencanaan kota besar yang sangat memberi pengaruh terhadap kualitas hidup warganya, selayaknya bukan sekedar merupakan *academic exercise* perancang kota, namun harus dilandasi oleh *social experience* yang intens dari mereka. Kekeliruan dalam strategi, konsep, maupun pendekatan perencanaan membawa implikasi sosial dalam kehidupan warga kota terutama dalam menciptakan disharmoni sosial, rasa kebosanan, anak muda yang kehilangan harapan, kehilangan makna hidup, merasa kesepian dalam kehidupan kota, konflik antar komunitas, perkelahian antar gang dan antar kelompok pelajar, membangkitkan sentimen rasial, premanisme, brutalisme dan vandalisme. Intinya adalah dehumanisasi.

Karena implikasi negatif yang demikian luas, akibat strategi pembangunan yang keliru, para arsitek dan perencana kota pada banyak negara maju, melakukan koreksi atas kota-kota besar mereka yang dibangun tanpa peduli akar sejarah dan biaya sosial yang harus dibayar warganya. Para arsitek dan perencana kota mencoba mencari pemecahan arsitektural melalui pendekatan “psiko spasial”, yang mampu menciptakan “suasana” dimana terjadi interaksi kuat antara manusia dengan manusia dan lingkungannya.

Walau bagaimanapun, kota memang harus terus tumbuh dan berkembang, bagaikan organisme. Akan tetapi sebagaimana pertumbuhan jasad hidup yang sehat, setiap unsur dan komponen kota sepatutnya dilihat sebagai sel-sel atau mosaik yang saling bertautan, holistik dan integralistik, serta menyenyawakan wajah dengan jiwa. Artinya, kota bukan semata-mata dipandang sebagai raga wadag, tetapi juga jiwa yang hidup melalui ragam perilaku budaya warganya.

Kishi Kurokawa adalah seorang pionir arsitektur metabolis di Jepang, yang menawarkan suatu pendekatan filosofis dalam perancangan kota, yakni

dengan mengadopsi dimensi budaya, dimana ragam, kecenderungan dan geraknya budaya kota dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat bersenyawa dengan pas dalam ruang arsitektural kota. Perancangan tidak lagi terpaku pada bentuk-bentuk yang biasa dikenal seperti pola-pola geometris dan kubisme yang monoton, namun yang lebih penting adalah keterbukaannya terhadap nilai-nilai baru. Merumuskan titik temu antar kutub-kutub yang sering bertentangan (*hybrid*), seperti: estetika lama dan baru, tradisional dan modern, privat dan publik. Menurut Kurokawa, segregasi spasial ruang kota hendaknya tidak mengurangi derajat pertautan sosial, dan tidak memicu segregasi dan polarisasi sosial atau bahkan disorganisasi sosial yang pada gilirannya dapat memicu konflik antar komunitas.

COMMUNITY ARCHITECTURE: Pendekatan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sementara itu, sejak tahun 1960-an di Amerika dan Eropa telah tumbuh gerakan menentang pendekatan perencanaan dan perancangan teknis-rasional yang dominan pada masa itu, serta juga memperjuangkan terbentuknya praktek profesional baru yang memiliki unsur moral dan politik, berkeadilan sosial, dan memberi kekuasaan pengambilan keputusan pada masyarakat (*citizen empowerment*). Gerakan ini kemudian menghasilkan beberapa paradigma perencanaan dan perancangan partisipatif seperti *Community Architecture* (Christopher dan Rossi, 2003). Jika diletakkan dalam konteks pendidikan, *community architecture* dan *community based development* adalah suatu pendekatan pembangunan kota berkelanjutan melalui pendidikan berkelanjutan (*life long education*) dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dan pranata sosial budayanya.

Community architecture dalam proses perancangan maupun pembangunan sebuah lingkungan/kawasan kota menjadi dasar dalam menggerakkan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Karena masyarakat dan kehidupannya merupakan realitas sosial yang tidak boleh diabaikan, mereka merupakan potensi sekaligus pengguna setiap karya arsitektur, sehingga antara masyarakat dan rancangan arsitektur seharusnya memiliki kesesuaian.

Community based development mengisyaratkan pentingnya pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, pola seperti itu memungkinkan partisipasi masyarakat dapat dikembangkan secara optimal. Partisipasi merupakan pemberdayaan (*engagement*) dari kelompok sasaran (*affected group*) dalam satu atau lebih siklus project/program/kegiatan: desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Masyarakat diajak untuk berperan dan didorong untuk berpartisipasi karena masyarakat dianggap: (a) mereka mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingannya/kebutuhan mereka, (b) mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya, (c) mereka mampu menganalisis sebab akibat dari berbagai kejadian di masyarakat (d) mereka mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, (e) mereka mampu memanfaatkan sumberdaya pembangunan (SDA, SDM, dana, sarana dan teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakatnya yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, (f) anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan SDM-nya sehingga berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu mengurangi dan bahkan menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar.

Penerapan paradigma *community architecture* dan *community based development* dapat diterapkan untuk menjawab kompleksitas kehidupan masyarakat perkotaan dan permasalahan lingkungan fisik. Namun demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan proses multi-disiplin, *multi-approach* dan harus simultan, yang melibatkan multi-pihak (*multi stakeholder*) karena perubahan merupakan proses pergeseran hubungan antar individu, antar kelompok atau perubahan institusi. Karena itu, pemberdayaan memerlukan intervensi pada sejumlah faktor/elemen penting untuk dapat berlangsung, yang semua elemen ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa proses perubahan pada aspek lainnya.

Membangun masyarakat yang berdaya, memiliki kepedulian, mau belajar dan berubah, memahami berbagai perbedaan, memiliki tujuan dan nilai komunitas yang dapat menjadi modal sosial untuk membangun lingkungan yang mereka tinggali merupakan proses panjang yang harus dilakukan. Untuk sebuah tujuan yang sederhana harus dimulai dengan

membangun kesadaran individu, serta yang terpenting bagaimana setiap individu masyarakat memahami permasalahan, hak, kewajiban serta tanggung jawab sosialnya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Sekaitan dengan itu, pemberdayaan setidaknya harus berfokus pada empat aspek: ekonomi, lingkungan, kelembagaan dan jaringan (*networking*) (Widaningsih, 2008). *Pertama*, penguatan ekonomi masyarakat dengan kegiatan unit usaha yang dapat membantu kegiatan perekonomian masyarakat setempat. *Kedua*, aspek lingkungan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam mendesain lingkungannya (ruang publik) sesuai kebutuhan mereka, melaksanakan pembangunan, menggunakan dan yang terpenting bagaimana memeliharanya agar hasil desain tersebut *sustainable* (berkelanjutan). *Ketiga* adalah penguatan kelembagaan lokal dan pendidikan masyarakat, aspek ini penting dilakukan sebagai upaya penanaman pemahaman bersama atas pentingnya lingkungan yang sehat yang dapat menunjang berbagai kegiatan kemasyarakatan serta bagaimana semua pihak baik secara individual maupun kelembagaan memiliki tanggungjawab bersama terhadap keberlanjutan lingkungannya. *Keempat* adalah pengembangan jaringan (*networking*), aspek ini merupakan penguatan jejaring kerjasama dengan lembaga/instansi formal (eksekutif dan legislatif), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), maupun swasta. Dalam pengembangan jaringan ini memungkinkan masyarakat mendapatkan akses yang lebih luas untuk bekerjasama dalam pembangunan lingkungan fisik dan sosialnya.

PERTEMUAN DUA PENDEKATAN: Sebuah Upaya Demokratisasi Ruang Publik Kota

Pertemuan dari kedua pendekatan di atas, pendekatan psiko-spasial dari sisi birokrat dan perencana kota serta *community architecture* dari sisi masyarakat, diyakini akan mampu menciptakan kota yang lebih manusiawi. Sebuah kota dengan ruang publik yang lebih demokratis. Demokratis secara fisik, karena dibangun dan ditata secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan. Demokratis secara kultural karena akan mewadahi keragaman perilaku, karakter, serta nilai-nilai dan simbol kultural masyarakat, sesuai dengan karakteristik lokal.

Arsitektur sebagai elemen demokrasi semestinya lahir dari prinsip *res publica* yang menjadikan arsitektur sebagai monumen sekaligus ruang yang melahirkan spontanitas politik publik atau ruang tempat *collective power* masyarakat tumbuh dan berkembang. Jika prinsip *res publica* ini terpenuhi, dan secara harmonis mau berinteraksi dengan fungsi *res privata* seperti jalan-jalan umum, ruang terbuka kota dan fungsi privat kota lainnya, maka akan terbentuklah apa disebut sebagai *the true city* atau *civitas* (Krier, 1997; Kamil, 2000)..

Ruang publik sendiri merupakan ruang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum sepanjang waktu, tanpa dipungut bayaran (Danisworo, 2004). Menurut Danisworo lebih lanjut, ruang publik tidak selalu berupa ruang terbuka hijau, akan tetapi suatu ruang dengan perkerasan seperti jalan raya maupun pelataran parkir, dapat menjalankan fungsi publik karena ruang tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum setiap waktu tanpa dipungut bayaran.

Melalui pertemuan dua pendekatan tersebut, ruang publik akan mencapai kriteria utama kualitas seperti disebutkan oleh Carr (1992), yaitu: tanggap (*responsive*), demokratis (*democratic*), dan bermakna (*meaningful*). Yang dimaksud tanggap (*responsive*) berarti bahwa ruang tersebut dirancang dan dikelola dengan mempertimbangkan kepentingan para penggunanya. Sedangkan demokratis (*democratic*) berarti bahwa hak para pengguna ruang publik tersebut terlindungi, pengguna ruang publik bebas berekspresi dalam ruang tersebut, namun tetap memiliki batasan tertentu karena dalam penggunaan ruang bersama perlu ada toleransi diantara para pengguna ruang. Pengertian bermakna (*meaningful*) mencakup adanya ikatan emosional antara ruang tersebut dengan kehidupan para penggunanya.

CATATAN AKHIR: Kesimpulan

Perilaku kekerasan yang diungkapkan oleh para anak-anak muda, merupakan bagian inheren dari kecenderungan perilaku umum masyarakat kota yang menderita apa yang disebut *sizofrenia kultural*. Realitas itu, untuk sebagian disebabkan oleh miskinnya ruang publik kota, yang tidak dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat kota.

Demokratisasi ruang publik kota melalui pendekatan psiko-spasial dan *community architecture* dalam pembangunan kota, adalah salahsatu solusi untuk menjawab persoalan tersebut. Namun demikian, memang tidak mudah untuk mempertemukan dan menerjemahkan kedua pendekatan dalam perencanaan dan pengembangan kota. Untuk itu, setiap perancang dan pengembang kota, penentu kebijakan, serta masyarakat sendiri selayaknya tetap memelihara komitmen guna menjadikan kota sebagai lingkungan yang manusiawi. Dalam sisi ini, kota harusnya tidak sekedar dipandang sebagai sumber daya ekonomi yang pantas untuk tandas di eksploitasi. Kota, adalah juga tempat hidup untuk jiwa yang hidup, yang berinteraksi secara manusiawi.

Dalam pikiran yang optimistik, dengan adanya reformasi transformasi politik dari orde baru yang sentralistik ke Indonesia baru yang desentralisasi dan otonomi, ada harapan bahwa pembangunan kota tidak lagi hanya berpusat di Jakarta, tetapi juga di seluruh kota-kota di Indonesia. Persoalannya, akankah strategi pembangunan kota-kota tersebut mengikuti pula pola pembangunan Jakarta dan kota-kota besar di dunia yang terbukti gagal memberi tempat yang manusiawi bagi masyarakatnya?

Pertanyaan terakhir tersebut, merupakan tantangan bagi para arsitek, perancang kota, dan para penentu kebijakan, untuk menemukan orientasi, strategi, dan pemecahan masalah yang relevan dan tepat dalam rangka pembangunan kota di masa depan. Dalam suasana dan elan reformasi, maka terma-terma desentralisasi, otonomi, pluralitas, partisipasi, dan makna sosial, tampaknya akan menjadi modal yang berharga untuk dieksplorasi. Hal ini sangat relevan dengan kedua pendekatan psiko-spasial dan *community architecture* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action (ALNAP) (2003), *Participation by Crisis-Affected Populations in Humanitarian Action, A Handbook for Practitioners* (www.alnap.org)
- Adisasmata, Rahardjo (2006), *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan: Konsep dan Model Community Development*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Achmadi, Amanda (2002). Perayaan Publik dalam Ruang yang Publik. Kompas Minggu, 1Desember 2002

- Carr, Stephen; Francism Mark; Rivlin, Leane; Stone, Andrew (1992), *Environment and Behavior Series. Public Space*. Cambridge University Press.
- Danisworo, Mohammad (2004), *Pemberdayaan Ruang Publik Sebagai Tempat Warga Kota Mengekspresikan Diri , Kawasan Gelora Bung Karno*. Makalah pada Seminar dan Lokakarya Pemberdayaan Area Publik di Dalam Kota yang diselenggarakan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).
- Day, Christopher (2003), *Consensus Design Socially Inclusive Process*, London: Architectural Press.
- Gehl, Jan. (1986). *Life between building, Using public space*. Van Nostrand Reinhold Co., New York
- Hariyono, Paulus (2007), *Sosiologi Kota untuk Arsitek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Houghton, Graham., and Colin Hunter. (1994). *Sustainable city*. Jessica Kingsley Publishers, London
- Kamil, M. Ridwan (2000). Menggugat Kembali Hak Demokrasi Rakyat di Ruang Publik . Kompas, 15 Maret 2000.
- Kemmis, Daniel (1995). *The Good City and the Good Life* . Boston, MA: Houghton Mifflin
- Krier, Rob (1997). *Urban Space*. New York: Rizzoli Internatinal Publications.
- Morris, Brian (1999). *If you build it, They will come*. University of Melbourne (b.morris @ english.unimelb.edu.au.)
- Santoso, Jo (2006). *(Menyiasati) Kota tanpa Warga*. Jakarta : Centropolis – Gramedia
- Trancik, Roger (1986). *Finding lost space, Theories of urban design*. Van Nostrand Reinhold Co., New York
- Youngentob, Kara, .Hostetler, Mark (2005). Is a New Urban Development Model Building Greener Communities? *Environment and Behavior Journal, Vol. 37, No. 6*. SAGE Publications
- Widner, Robert C. (1994). *Understanding spot zoning*. Planners Web, Planning Commissioners Journal (www.plannersweb.com)

Tentang Penulis:

M. Syaom Barliana, adalah Dosen pada Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur, Universitas Pendidikan Indonesia. Lahir di Kuningan, Jawa Barat, pada tanggal 4 Pebruari 1963. Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada program studi Pendidikan Teknik Bangunan FPTK IKIP Bandung, 1987; Pendidikan pascasarjana S2 (M.Pd. dan M.T) di program studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan IKIP Jakarta/IKIP Yogyakarta, 1995 dan program studi Arsitektur Universitas Parahyangan, Bandung, 2002; pendidikan Doktor pada program studi pendidikan IPS/Geografi UPI, 2008. Menulis sejumlah artikel di berbagai surat kabar dan jurnal ilmiah; Menulis dan menyunting buku, diantaranya adalah: *Terminologi Arsitektur: Dari Axismundi sampai Zoning* (Bandung, IKIP Bandung Press, 1998), *Membaca itu Indah* (UPI Press, IKA UPI, dan Kelompok Diskusi MATAKU, Bandung, 2005); Penyunting Pelaksana pada jurnal ilmiah *Mimbar Pendidikan*, Ketua Penyunting pada *INVOTEC* (jurnal pendidikan teknologi kejuruan), Redaksi Pelaksana *EDUCARE* (jurnal guru). Disamping sebagai Dosen, juga berpraktek sebagai Arsitek Profesional, dan menjadi anggota IAI (Ikatan Arsitek Indonesia).